LAPORAN

ANALISIS SOSIAL MASYARAKAT DALAM PENGEMBANGAN KAPAL LOGISTIK KONSORSIUM MERAH PUTIH BAWEAN KAB. GRESIK

2025

INSTIUT AGAMA ISLAM DARUTTQWA GRESIK KERJASAMA DENGAN BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH KAB. GRESIK TAHUN 2025

ANALISA SOSIAL MASYARAKAT DALAM PENGEMBANGAN KAPAL LOGISTIK KONSORSIUM MERAH PUTIH BAWEAN 2025:

ABSTRAK

Laporan ini disusun atas kerjasama antara **Institut Agama Islam DARUTTAQWA Gresik** bekerjasama dengan **BAPPEDA Kabupaten Gresik** pada Kajian awal tersebut sebagai langkah awal sebagai bahan Analisa Sosial Masyarakat Bawean dalam mewujudkan alat Transportasi Laut yang aman, nyaman dan cepat, maka melalui konsorsium Koperasi Merah Putih Bawean ingin mewujudkan Kapal Logistik untuk menumbuhkembangkan sosial ekonomi, mendukung mobilisasi barang dan masyarakat bawean serta mempercepat pertumbuhan sosial masyarakat dan ekonomi yang inklusif Fokus utama dalam kajian ini berada di Pulau Bawean yakni kecamatan Sangkapura dan kecamatan Tambak, wilayah tersebut yang sangat bergantung pada akses laut namun masih menghadapi tantangan logistik, seperti biaya tinggi dan jadwal pelayaran yang tidak pasti akibat cuaca buruk.

Urgensi dan Tujuan kajian tersebut menjamin kelancaran arus barang pokok, menekan disparitas harga, dan meningkatkan stabilitas ekonomi di Bawean Beberapa indikator kebutuhan mendesak meliputi: **Ketersediaan Armada,** Saat ini terbatas dan tidak reguler, **Ketahanan Pangan** Sangat rentan terhadap cuaca ekstrem yang menyebabkan risiko kelangkaan, **Distribusi BBM:** Masih sangat bergantung pada daratan utama Gresik, **Kondisi Demografi dan Populasi Sosial,** Estimasi penduduk Bawean mencapai **85.320 jiwa** pada pertengahan 2024, yang tersebar di Kecamatan Sangkapura dan Tambak **Mata Pencarian:** Sektor perikanan menjadi tulang punggung ekonomi utama (32-40%), diikuti oleh pertanian dan perdagangan

Analisis Sosial Masyarakat, Berdasarkan Diskusi Kelompok Terarah (FGD), ditemukan beberapa poin penting; **Persepsi:** Masyarakat masih menganggap program ini sebagai wacana awal dan menuntut kejelasan tujuan. **Aspirasi Desain:** Masyarakat lebih membutuhkan **kapal kombinasi logistik-penumpang** dari pada kapal logistik murni, **Risiko Konflik:** Ada potensi konflik terkait monopoli logistik, perebutan muatan saat musim angin, dan transparansi tata kelola.

Rekomendasi Kebijakan; (1) Langkah strategis Pemerintah Daerah perlu menegaskan bahwa program kapal logistik masih berada pada tahap kajian, serta memastikan keterbukaan informasi terkait tujuan, skema, dan batasan program. (2) Desain kapal harus diarahkan pada kapal logistik–penumpang yang tahan terhadap gelombang minimal 3 meter, sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakat Bawean. (3) Partisipasi dan Keterlibatan KDMP Merah Putih, harus dimulai dari proses perencanaan awal melalui musyawarah internal dan persetujuan anggota. (4) Reguasi dan Pengawasan dengan Skema pembiayaan wajib disertai dengan jaminan asuransi, analisis kelayakan usaha, serta pembagian risiko yang adil.

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT karena berkat Rahmat dan Hidayah-Nya kegiatan Swakelola Kajian Analisis Sosial Masyarakat dalam Pengembangan Kapal Logistik konsorsium Merah Putih Bawean Kab. Gresik, atas kerjasama antara Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah BAPPELITBANG Kab. Gresik dengan Institut Agama Islam Daruttaqwa (INSIDA) Gresik tahun anggaran 2025 telah kami terima.

Bantuan tersebut kami manfaatkan untuk kegiatan kajian dan atau studi lapangan di Bawean melalui kegiatan Fokus Group Diskusi (FGD) dan atau wawanacara langsung pada stakeholders serta kebutuhan kajian lain antara Tim pelaksana bersama Tim Ahli guna mendiskusikan dan menganalisis hasil di lapangan. ucapan terima kasih kami sampaikan kepada semua pihak khususnya BAPPELITBANG dan Pemerintah Kabupaten Gresik yang telah membantu terlealisasinya Kajian studi Analisis Sosial Masyarakat dalam Pengembangan Kapal Logistik konsorsium Merah Putih Bawean Kab. Gresik.

Kritik dan saran guna penyempurnaan hasil kajian tersebut sangat kami butuhkan, sehingga bisa menjadi sumbangsih pemikiran dalam melakukan pengambilan kebijakan selanjutnya oleh pemerintah kabupaten gresik. Semoga sumbangsih pemikiran dan amal baik yang diberikan mendapat Ridho dari Allah SWT. Amin

DAFTAR ISI

Halaman sampul

Kata Pengantar 1

BAB 1 LATAR BELAKANG 3

1.1 Latar Belakang 3

1.2 Tujuan Kajian 5

1.3 Sasaran Kajian 5

1.4 Ruang Lingkup Kajian 5

1.5 Metodologi Kajian 6

BAB 2 PROFIL SOSIAL MASYARAKAT PULAU BAWEAN 7

2.1 Kondisi Geografi Pulau Bawean 7

2.2 Kondisi Demografi Pulau Bawean 8

2.3 Kondisi Sosial dan Budaya Masyarakat 9

2.4 Kondisi Ekonomi dan Mata Pencaharian 10

2.5 Infrastruktur Transportasi dan logistik 13

BAB 3 PROGRAM PENGEMBANGAN KAPAL LOGISTIK KONSORSIUM KDMP 17

1.3 Pengantar Program Pengembangan Kapal Logistik 17

1.4 Urgensitas Program Pengembangan Kapal logistik 19

1.5 Tujuan, Sasaran dan ruang Lingkup Program 20

1.6 Skema Pelaksanaan dan Kelembagaan Kapal 22

BAB 4 ANALISIS SOSIAL MASYARAKAT DALAM PENEMBANGAN KAPAL LOGISTIK 26

1.1 Persepsi, Partisipasi dan Respon Masyarakat 26

1.2 Dampak Sosial Ekonomi Pengembangan kapal Logistik 27

1.3 Potensi Konflik Sosial dan Strategi Mitigasi 28

1.4 Analisi Keberlanjutan sosial program 29

BAB 5 PENUTUP Rekomendasi Kebijakan Sementara 31

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR GAMBAR

BAB I
LATAR BELAKANG

1.1 Latar belakang

Masyarakat Bawean memiliki karakteristik sosial yang kuat pada tradisi merantau, solidaritas tinggi, dan keislaman yang kental. Tradisi tersebut sudah diwariskan turun-temurun sebagai bagian dari identitas dan kebanggaan, dengan nilai-nilai solidaritas yang tercermin dalam kebersamaan saat berada di perantauan, seperti di Malaysia, Singapura dan bahkan Australia dan Vietnam. Selain itu, mayoritas penduduknya memeluk agama Islam, yang dipengaruhi kuat oleh tokoh agama sejak masa lampau, serta kuatnya peranan tokoh agama sebagai pemuka masyarakat.

Merantau dianggap sebagai kebanggaan dan pencapaian hidup, yang tertanam sejak kecil melalui syair kembara. Dalam perantauan telah terbentuk Komunitas Bawean di perantauan memiliki nilai solidaritas yang kuat untuk saling membantu dalam berbagai kebutuhan, baik melalui pengawalan, "Kampung Boyan" atau kegiatan "ngater-ngateraken" (mengantar). Tujuan merantau sebagai bentuk masyarakat pekerja keras, saling menghormati, kerja sama, dan tolong-menolong. Kepercayaan dan Budaya Lokal sangat kuat, Bawean memiliki kepercayaan yang kuat akan keamanan di kampung halamannya, terlihat dari minimnya angka kejahatan dan kriminalitas, kebiasaan unik membiarkan kunci kendaraan atau motor tetap terpasang di motor tersebut.

Secara geografis letak Pulau Bawean ini berada di Laut Jawa kira-kira 80 mil sebelah Utara Jawa, kira-kira 120 km.39 Menurut Jacob Vredenbregt, penelitian geogologis menunjukkan bahwa pulau Bawean adalah bekas gunung api yang terdiri dari batuan alkali yang kurang mengandung asam silikon. Bahwa vulkanis terutama terdiri dari batuan leusit dan nefelin. Sebelum tahun 1974 Bawean berada pada dalam wilayah Surabaya sebelum dibentuk kabupaten Gresik, namun sejak tahun 1974 sampai sekarang Pulau Bawean di masukkan kedalam wilayah Kebupaten Gresik karena memang letaknya lebih dekat dengan kabupaten Gresik dari pada Surabaya. Bawean memiliki dua kecamatan dan 30 desa, dua kecamatan tersebut yaitu kecamatan Sangkapura dan kecamatan Tambak.Kecamatan Sangkapura terdapat 17 desa dan kecamatan Tambak

terdapat 13 desa. Pulau Bawean memiliki 142 dusun (kampung) karakteristik Demografi jumlah penduduk Bawean yakni kecamatan Tambak dan Sangkapura kurang lebih berjumlah 90.000 jiwa. Sedangkan Kabupaten Gresik saat ini mempunyai jumlah penduduk 1.327.497 jiwa [laki-laki 667.540 jiwa, perempuan 659.957 jiwa] dari data agregat semester II 2024.

Pulau Bawean merupakan sebuah pulau yang secara administratif masuk dalam Kabupaten Gresik, Provinsi Jawa Timur, dengan pembagian wilayah terdiri dari dua kecamatan yaitu Kecamatan Sangkapura dan Tambak. Komposisi demografis pulau ini mengalami karakteristik yang unik, terutama terkait mobilitas kerja dan migrasi laki-laki ke luar pulau atau luar negeri untuk bekerja, sehingga menyebabkan rasio gender di pulau ini terlihat lebih tinggi pada populasi perempuan yang tinggal di lokasi. Fenomena ini membuat Pulau Bawean sering disebut sebagai *"Pulau Wanita"* karena proporsi perempuan yang tinggal di pulau ini jauh lebih tinggi daripada laki-laki yang menetap secara permanen. Selain itu, Pulau Bawean memiliki sebaran penduduk yang tidak merata; sebagian besar penduduk terkonsentrasi di kecamatan **Sangkapura** di bagian selatan pulau, sedangkan **Tambak** di bagian utara memiliki populasi yang lebih kecil.

Struktur usia penduduk Pulau Bawean cenderung didominasi oleh kelompok usia produktif, meskipun banyak dari mereka yang berada di usia kerja justru **merantau ke luar pulau**, khususnya ke daerah urban dan negara tetangga seperti Malaysia dan Singapura. Hal ini memengaruhi dinamika keluarga dan ekonomi lokal, karena remiten dari para perantau menjadi salah satu sumber pendapatan keluarga di pulau tersebut. Di samping itu, masyarakat Pulau Bawean umumnya memiliki latar belakang etnis campuran, termasuk Bawean asli serta pengaruh budaya Madura dan Jawa, yang turut membentuk karakter sosial dan budaya populasi di pulau ini. Penduduk beragama Islam menjadi mayoritas, dan bahasa Bawean yang merupakan variasi dari bahasa Madura juga digunakan secara luas dalam interaksi sehari-hari, meskipun bahasa Indonesia tetap menjadi bahasa resmi dan pengantar pendidikan

Kajian awal tersebut sebagai langkah awal sebagai bahan Analisa Sosial Masyarakat Bawean dalam mewujudkan alat Transportasi Laut yang aman, nyaman dan cepat, maka melalui konsorsium Koperasi Merah Putih Bawean ingin mewujudkan Kapal Logistik untuk menumbuhkembangkan sosial ekonomi,

mendukung mobilisasi barang dan masyarakat bawean serta mempercepat pertumbuhan sosial masyarakat dan ekonomi yang inklusif.

1.2 Tujuan Kajian

Tujuan penyusunan Kajian awal penelitian ini untuk mengetahui persepsi dan analisis sosial Masyarakat bawean dalam Pengembangan kapal logistik konsorsium merah putih Bawean.

1.3 Sasaran kajian

Tersusunnya dokumen penelitian awal kondisi Sosial masyarakat Bawean, Kajian ini dilaksanakan di Masyarakat Bawean Kabupaten Gresik, stakeholder yang menjadi sasaran antara lain; Ketua atau pengurus KDMP se-Bawean, Perwakilan Kepala Desa, Tokoh Agama, pelaku bisnis UKM, tokoh pendidikan, tokoh perempuan, tokoh budaya, pemuda dan stakeholders lain yang terkait.

1.4 Ruang lingkup Kajian

Deskripsi yang sudah dijelaskan diatas maka ruang lingkup dari kajian ini adalah :

1. Pengumpulan data Skunder dan data Demografi masyarakat bawean yakni; Budaya dan kultur sosial, Agama, umur dan jenis kelamin, pekerjaan, tingkat pedapatan dan kemiskinan, pendidikan dan kesehatan Masyarakat)
2. Mengidentifikasi dan menganalisis Kesenjangan Sosial Masyarakat terhadap Pengembangan Kapal Logistik Bawean – Gresik
3. Menganalisis Dampak Manfaat Sosial, Menilai Nilai Sosial dan Lingkungan yang dihasilkan dari adanya Investasi Kapal Logistik dari konsorsium merah Putih Bawean.
4. Penyusunan Rekomendasi dalam rangka pengambilan keputusan dan kebijakan strategis daerah.

1.5 Metodologi Kajian

Kajian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif. Menurut Sugiyono (2019) metode penelitian kualitatif digunakan untuk meneliti kondisi

objek yang alamiah di mana peneliti berperan sebagai instrumen kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi, analisis data bersifat induktif, dan hasil penelitian lebih menekankan makna Pendekatan ini dipilih karena permasalahan yang dikaji berkaitan dengan fenomena sosial yang membutuhkan pemahaman mendalam mengenai kondisi lapangan, khususnya terkait hambatan dan tantangan yang dihadapi Koperasi Desa Merah Putih di pulau Bawean. Data penelitian diperoleh melalui observasi langsung dengan metode Fokus Group Diskus, wawancara informal dan formal dengan perangkat desa, Pengurus KDMP, kelompok perempuan, tokoh Agama tokoh pemuda, tokoh pendidikan yang menjadi peserta FGD.

Kajian ini dimulai dan dilaksanakan dengan berbagai kegiatan antara lain;

1. Persiapan dan Design Riset (penyamaan persepsi dengan pemerintah Kab. Gresik) melalui diskusi bersama dan kajian dokumen awal kebijakan yang terkait dengan KDMP
2. Pengumpulan Data Skunder maupun Primer melalui Persepsi langsung atau wawancara dari masyarakat dan berbagai Stakeholder. Penelitian ini menggunakan pendekatan sosiosemiotika dengan desain deskriptif kualitatif untuk menelaah keterkaitan antara tanda-tanda budaya ikon, indeks sosial masyarakat, harapan tantangan dan solusi dengan konteks sosial masyarakat, dengan fokus pada dua kecamatan Tambak dan Sangkapura.
   Pengumpulan data dilakukan melalui observasi dan Fokus Group Diskusi partisipatif, wawancara semiterstruktur, dan dokumentasi. Pada tahap persiapan, peneliti menyusun pedoman wawancara, melakukan koordinasi dengan tokoh masyarakat,
3. Analisis dan Pelaporan; menyusun laporan, diskusi dengan stakeholders lain. Data yang diperoleh dianalisis melalui proses reduksi, penyajian, dan penarikan kesimpulan dan Rekomendasi.

BAB II
PROFIL SOSIAL MASYARAKAT PULAU BAWEAN

1.1 Kondisi Geografi Pulau Bawean

Pulau Bawean merupakan sebuah pulau kecil yang secara administratif termasuk dalam wilayah Kabupaten Gresik, Provinsi Jawa Timur, dan terbagi ke dalam dua kecamatan, yaitu Kecamatan Sangkapura dan Kecamatan Tambak. Secara geografis, Pulau Bawean terletak di tengah Laut Jawa, sekitar 120 kilometer di sebelah utara Kota Gresik. Pulau ini memiliki luas kurang lebih 210 km² dengan kondisi topografi yang didominasi oleh perbukitan dan pegunungan rendah di bagian tengah pulau, sementara wilayah pesisirnya berupa dataran sempit yang dimanfaatkan sebagai kawasan permukiman, pelabuhan, serta pusat aktivitas ekonomi masyarakat. Kondisi topografi yang bergelombang hingga berbukit menyebabkan pola permukiman penduduk cenderung memanjang mengikuti garis pantai dan lembah-lembah yang relatif datar. Dari sisi iklim, Pulau Bawean beriklim tropis dengan dua musim, yaitu musim hujan dan musim kemarau, yang dipengaruhi oleh angin muson barat dan timur. Curah hujan yang relatif tinggi mendukung keberadaan hutan tropis, sumber mata air, serta danau alami seperti Danau Kastoba yang menjadi ciri khas bentang alam Pulau Bawean. Potensi sumber daya alam Pulau Bawean meliputi hasil perikanan laut, pertanian lahan kering, perkebunan rakyat, serta potensi pariwisata alam dan bahari yang cukup besar, meskipun belum dikelola secara optimal.

Sebagai wilayah kepulauan yang terpisah dari Pulau Jawa, Pulau Bawean memiliki tingkat ketergantungan yang cukup tinggi terhadap Kota Gresik sebagai pusat pemerintahan, ekonomi, dan pelayanan publik. Ketergantungan ini terlihat jelas dalam pemenuhan kebutuhan pokok masyarakat, seperti bahan pangan, bahan bakar, bahan bangunan, serta barang konsumsi lainnya yang sebagian besar didatangkan dari Gresik melalui jalur transportasi laut. Selain itu, hasil produksi masyarakat Bawean, khususnya hasil perikanan dan pertanian, juga dipasarkan ke Kota Gresik sebagai pusat distribusi dan perdagangan. Dalam bidang pelayanan, masyarakat Pulau Bawean masih sangat bergantung pada Kota Gresik untuk pendidikan lanjutan, layanan kesehatan rujukan, administrasi

pemerintahan, serta akses pekerjaan dan perdagangan berskala lebih besar. Transportasi laut melalui pelabuhan Bawean–Gresik menjadi urat nadi utama yang menghubungkan kedua wilayah tersebut, sehingga kondisi cuaca dan gelombang laut sangat memengaruhi mobilitas penduduk dan arus logistik. Dengan demikian, meskipun secara geografis Pulau Bawean memiliki karakter wilayah yang relatif terisolasi, secara fungsional pulau ini tetap terintegrasi dan bergantung erat pada Kota Gresik dalam mendukung keberlanjutan kehidupan sosial, ekonomi, dan pembangunan wilayahnya.

1.2 Kondisi Demografi Pulau bawean

Berikut adalah uraian **kondisi demografi Pulau Bawean** sebagai wilayah administratif yang mencakup dua kecamatan (Sangkapura dan Tambak) lengkap dengan **data terbaru jumlah penduduk** dan **tabel penduduk per kecamatan**.

Pulau Bawean merupakan sebuah pulau yang secara administratif masuk dalam **Kabupaten Gresik, Provinsi Jawa Timur**, dengan pembagian wilayah terdiri dari dua kecamatan yaitu Kecamatan **Sangkapura** dan **Tambak**. Berdasarkan **perkiraan resmi terbaru per pertengahan 2024**, jumlah penduduk Pulau Bawean mencapai sekitar **85.320 jiwa**, menunjukkan tren pertumbuhan dibandingkan data sensus sebelumnya (80.289 jiwa pada **2020**). Komposisi demografis pulau ini mengalami karakteristik yang unik, terutama terkait **mobilitas kerja dan migrasi** laki-laki ke luar pulau atau luar negeri untuk bekerja, sehingga menyebabkan rasio gender di pulau ini terlihat lebih tinggi pada populasi perempuan yang tinggal di lokasi. Fenomena ini membuat Pulau Bawean sering disebut sebagai *"Pulau Wanita"* karena proporsi perempuan yang tinggal di pulau ini jauh lebih tinggi daripada laki-laki yang menetap secara permanen. Selain itu, Pulau Bawean memiliki sebaran penduduk yang tidak merata; sebagian besar penduduk terkonsentrasi di kecamatan **Sangkapura** di bagian selatan pulau, sedangkan **Tambak** di bagian utara memiliki populasi yang lebih kecil.

Struktur usia penduduk Pulau Bawean cenderung didominasi oleh kelompok usia produktif, meskipun banyak dari mereka yang berada di usia kerja justru **merantau ke luar pulau**, khususnya ke daerah urban dan negara tetangga seperti Malaysia dan Singapura. Hal ini memengaruhi dinamika keluarga dan ekonomi lokal, karena remiten dari para perantau menjadi salah satu sumber

pendapatan keluarga di pulau tersebut. Di samping itu, masyarakat Pulau Bawean umumnya memiliki latar belakang etnis campuran, termasuk Bawean asli serta pengaruh budaya Madura dan Jawa, yang turut membentuk karakter sosial dan budaya populasi di pulau ini. Penduduk beragama Islam menjadi mayoritas, dan bahasa Bawean yang merupakan variasi dari bahasa Madura juga digunakan secara luas dalam interaksi sehari-hari, meskipun bahasa Indonesia tetap menjadi bahasa resmi dan pengantar pendidikan.

Berikut ini adalah **tabel jumlah penduduk Pulau Bawean menurut kecamatan** berdasarkan data sensus dan estimasi resmi terbaru:

Kecamatan	Luas Wilayah (km²)	Populasi Sensus 2010	Populasi Sensus 2020	Estimasi PopulasiMid 2024
Sangkapura	118.72	45,755	50,612	**54,311**
Tambak	78.70	24,475	29,677	**31,009**
Total	**197.42**	**70,230**	**80,289**	**85,320**

Data sumber resmi Badan Pusat Statistik (BPS) dan estimasi pemerintah daerah.

Secara keseluruhan, demografi Pulau Bawean memperlihatkan dinamika yang dipengaruhi oleh migrasi tenaga kerja, komposisi gender yang tidak seimbang di wilayah asal, serta pertumbuhan populasi yang stabil dalam beberapa dekade terakhir. Pola migrasi yang tinggi berkontribusi pada struktur sosial ekonomi pulau serta memengaruhi kebutuhan pelayanan pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur yang masih terpusat dan sering membutuhkan akses ke wilayah utama di Kabupaten Gresik. Ketersediaan ril data demografi ini penting untuk perencanaan pembangunan wilayah jangka panjang di Pulau Bawean maupun integrasinya dengan layanan di daratan Gresik.

2. 3 Kondisi Sosial Budaya Masyarakat Bawean

Pulau Bawean dikenal sebagai salah satu pulau di Kabupaten Gresik yang memiliki kekayaan sosial budaya yang khas dan terbentuk dari sejarah panjang interaksi masyarakat lokal dengan budaya luar. Penduduk Pulau Bawean didominasi oleh etnis Bawean yang memiliki kedekatan budaya dengan Madura, namun juga dipengaruhi unsur Jawa, Melayu, dan budaya pesisir akibat aktivitas

pelayaran dan perdagangan sejak masa lampau. Dalam kehidupan sehari-hari, masyarakat Bawean masih memegang kuat nilai-nilai sosial seperti gotong royong, kebersamaan, dan solidaritas sosial yang tercermin dalam kegiatan kemasyarakatan, keagamaan, maupun adat istiadat. Bahasa Bawean yang merupakan dialek khas dengan pengaruh bahasa Madura digunakan secara luas dalam komunikasi informal, sementara bahasa Indonesia digunakan dalam pendidikan dan urusan resmi. Agama Islam menjadi identitas utama masyarakat Bawean dan berperan penting dalam membentuk pola kehidupan sosial, norma, serta perilaku masyarakat.

Kehidupan sosial budaya masyarakat Pulau Bawean juga sangat dipengaruhi oleh tradisi merantau, khususnya bagi kaum laki-laki yang bekerja di luar daerah maupun luar negeri, seperti Malaysia dan Singapura. Tradisi merantau ini tidak hanya berdampak pada struktur keluarga, tetapi juga membentuk pola sosial yang unik, di mana perempuan memiliki peran penting dalam mengelola rumah tangga, ekonomi lokal, dan kegiatan sosial di desa. Remitansi dari para perantau turut mendukung penyelenggaraan kegiatan budaya, pembangunan fasilitas sosial, serta pelaksanaan upacara adat dan keagamaan. Dalam bidang kesenian, masyarakat Bawean masih melestarikan berbagai bentuk seni tradisional seperti hadrah, pencak silat, seni musik rebana, serta tradisi lisan yang diwariskan secara turun-temurun. Selain itu, berbagai ritual sosial-keagamaan seperti selamatan, tahlilan, dan peringatan hari besar Islam menjadi sarana penguatan ikatan sosial antarwarga.

Secara administratif, Pulau Bawean terbagi menjadi Kecamatan Sangkapura dan Kecamatan Tambak, yang masing-masing memiliki kekhasan sosial budaya meskipun tetap berada dalam satu kesatuan budaya Bawean. Kecamatan Sangkapura, sebagai pusat pemerintahan dan aktivitas ekonomi, menunjukkan dinamika sosial yang lebih terbuka dengan pengaruh modernisasi yang cukup kuat, namun tetap mempertahankan tradisi lokal. Sementara itu, Kecamatan Tambak cenderung lebih tradisional dengan kehidupan sosial yang masih sangat erat dengan adat, kekerabatan, dan nilai-nilai lokal. Keberagaman budaya ini menjadi modal sosial penting bagi Pulau Bawean dalam menjaga identitas budaya sekaligus mendukung pengembangan pariwisata budaya dan penguatan karakter masyarakat. Pelestarian budaya lokal di tengah arus globalisasi menjadi

tantangan sekaligus peluang untuk mempertahankan jati diri Pulau Bawean sebagai pulau dengan kekayaan sosial budaya yang khas dan bernilai tinggi.

Tabel Kekayaan Sosial Budaya Penduduk Pulau Bawean per Kecamatan

Kecamatan	Bahasa Dominan	Kesenian Tradisional Utama	Tradisi Sosial Budaya Khas
Sangkapura	Bawean, Indonesia	Hadrah, Rebana, Pencak Silat	Selamatan, Tahlilan, Tradisi Merantau
Tambak	Bawean	Rebana, Seni Religi, Pencak Silat	Gotong Royong, Upacara Keagamaan, Adat Kekerabatan

2. 4 Kondisi Ekonomi dan mata pencarian Masyarakat

Kondisi ekonomi masyarakat Pulau Bawean sangat dipengaruhi oleh karakter geografisnya sebagai wilayah kepulauan yang relatif terpisah dari pusat ekonomi utama di daratan Jawa. Secara umum, perekonomian Bawean masih didominasi oleh sektor primer dan kegiatan ekonomi tradisional, dengan tingkat ketergantungan yang cukup tinggi terhadap sumber daya alam dan kondisi alam sekitar. Mata pencarian utama masyarakat meliputi sektor perikanan, pertanian lahan kering, perkebunan rakyat, serta perdagangan skala kecil. Letak Pulau Bawean yang dikelilingi laut menjadikan sektor perikanan sebagai tulang punggung ekonomi masyarakat, terutama di wilayah pesisir. Nelayan tradisional menangkap ikan menggunakan perahu kecil dan alat tangkap sederhana, dengan hasil tangkapan yang sangat bergantung pada musim, cuaca, dan kondisi gelombang laut. Selain itu, aktivitas budidaya perikanan masih terbatas dan belum berkembang secara optimal akibat keterbatasan modal, teknologi, dan akses pasar.

Di sektor pertanian, masyarakat Bawean umumnya mengelola lahan kering dengan komoditas utama seperti jagung, singkong, kacang-kacangan, kelapa, dan beberapa jenis tanaman hortikultura. Pertanian di Pulau Bawean bersifat subsisten dan sangat dipengaruhi oleh curah hujan, mengingat keterbatasan sistem irigasi teknis. Perkebunan rakyat, seperti kelapa dan cengkih, menjadi sumber pendapatan tambahan bagi sebagian masyarakat, meskipun hasilnya tidak menentu. Selain sektor primer, kegiatan ekonomi masyarakat juga

berkembang di sektor perdagangan dan jasa, terutama di pusat-pusat kecamatan dan desa pesisir. Warung kelontong, pasar tradisional, jasa transportasi laut lokal, serta usaha kecil berbasis rumah tangga menjadi bagian penting dalam menopang ekonomi keluarga. Dalam beberapa tahun terakhir, potensi pariwisata alam dan bahari mulai memberikan kontribusi ekonomi, meskipun masih berskala kecil dan bersifat musiman.

Salah satu ciri khas ekonomi masyarakat Bawean adalah tingginya tradisi merantau, khususnya bagi laki-laki usia produktif yang bekerja di luar pulau, baik di kota-kota besar di Indonesia maupun di luar negeri seperti Malaysia dan Singapura. Remitansi atau kiriman uang dari para perantau menjadi sumber pendapatan yang sangat penting bagi keluarga yang tinggal di Pulau Bawean dan berperan besar dalam menopang perekonomian lokal. Dana remitansi tersebut digunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, biaya pendidikan, pembangunan rumah, serta modal usaha kecil. Kondisi ini menyebabkan struktur ekonomi Bawean tidak hanya bergantung pada aktivitas lokal, tetapi juga pada arus ekonomi eksternal. Secara administratif, perbedaan karakter ekonomi terlihat antara Kecamatan Sangkapura dan Kecamatan Tambak. Sangkapura sebagai pusat pemerintahan dan perdagangan memiliki aktivitas ekonomi yang lebih beragam dan dinamis, sedangkan Tambak cenderung lebih bergantung pada sektor perikanan dan pertanian tradisional. Meskipun demikian, kedua kecamatan sama-sama menghadapi tantangan berupa keterbatasan infrastruktur, akses pasar, dan ketergantungan pada transportasi laut, yang perlu diatasi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan.

Tabel Mata Pencarian Utama Masyarakat Pulau Bawean per Kecamatan

Kecamatan	Perikanan (%)	Pertanian & Perkebunan (%)	Perdagangan & Jasa (%)	Pekerja Migran/Perantau (%)
Sangkapura	32	25	23	20
Tambak	40	30	15	15

Tabel menunjukkan perkiraan proporsi mata pencarian utama masyarakat berdasarkan karakter ekonomi wilayah masing-masing kecamatan.

2. 5 Kondisi Infrastruktur kapal dan Logistik

Kondisi infrastruktur dan logistik di Pulau Bawean sangat dipengaruhi oleh letak geografisnya sebagai pulau yang terpisah dari daratan utama Pulau Jawa. Aksesibilitas menjadi tantangan utama bagi masyarakat Bawean, terutama dalam mendukung mobilitas penduduk, distribusi barang, serta pelayanan publik. Infrastruktur transportasi laut memegang peranan paling vital, karena menjadi satu-satunya jalur utama penghubung antara Pulau Bawean dan Kabupaten Gresik. Pelabuhan Sangkapura dan Pelabuhan Tambak berfungsi sebagai pintu masuk dan keluar orang maupun barang, baik melalui kapal penumpang maupun kapal logistik. Namun, frekuensi pelayaran yang terbatas serta ketergantungan pada kondisi cuaca dan gelombang laut sering menyebabkan keterlambatan distribusi barang dan mobilitas masyarakat. Kondisi ini berdampak langsung pada kestabilan harga kebutuhan pokok, ketersediaan bahan bakar, serta kelancaran aktivitas ekonomi masyarakat.

Dari sisi infrastruktur darat, jaringan jalan di Pulau Bawean sebagian besar telah menghubungkan antar desa dan kecamatan, namun kualitasnya masih bervariasi. Jalan utama yang menghubungkan pusat kecamatan relatif sudah beraspal, sedangkan jalan lingkungan dan akses menuju wilayah perbukitan masih banyak yang sempit dan mengalami kerusakan, terutama saat musim hujan. Keterbatasan infrastruktur jalan ini memengaruhi distribusi hasil pertanian dan perikanan dari desa-desa menuju pasar lokal maupun pelabuhan. Infrastruktur pendukung lainnya, seperti listrik dan air bersih, telah menjangkau sebagian besar wilayah permukiman, meskipun pasokan listrik masih bergantung pada sistem kelistrikan yang rentan terhadap gangguan cuaca. Penyediaan air bersih umumnya bersumber dari mata air alami dan sumur, dengan tantangan ketersediaan air pada musim kemarau di beberapa desa.

Dalam aspek logistik dan pelayanan publik, Pulau Bawean masih sangat bergantung pada Kota Gresik sebagai pusat distribusi barang, layanan kesehatan rujukan, serta administrasi pemerintahan tingkat kabupaten. Barang kebutuhan pokok, bahan bangunan, alat kesehatan, dan perlengkapan pendidikan sebagian besar didatangkan dari Gresik melalui jalur laut. Ketergantungan ini menyebabkan biaya logistik menjadi relatif tinggi dibandingkan wilayah daratan, yang pada akhirnya berpengaruh terhadap daya

beli masyarakat. Di sisi lain, infrastruktur telekomunikasi menunjukkan perkembangan yang cukup signifikan dalam beberapa tahun terakhir. Jaringan seluler dan internet telah menjangkau hampir seluruh wilayah kecamatan, meskipun kualitas sinyal di daerah perbukitan masih belum merata. Perkembangan ini membuka peluang bagi peningkatan akses informasi, layanan digital, serta pemasaran produk lokal. Secara keseluruhan, kondisi infrastruktur dan logistik Pulau Bawean menunjukkan adanya kemajuan, namun masih memerlukan peningkatan berkelanjutan, terutama pada transportasi laut, kualitas jalan, dan sistem distribusi logistik, agar mampu mendukung pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat secara lebih merata.

Tabel; Kondisi Infrastruktur Utama Pulau Bawean (Data Terbaru)

Jenis Infrastruktur	Kecamatan Sangkapura	Kecamatan Tambak	Keterangan Umum
Pelabuhan Laut	Tersedia (Pelabuhan Sangkapura)	Tersedia (Pelabuhan Tambak)	Penghubung utama Bawean–Gresik
Jaringan Jalan	Relatif baik di pusat kecamatan	Cukup, sebagian rusak	Jalan desa dan perbukitan perlu peningkatan
Listrik	Menjangkau hampir seluruh wilayah	Menjangkau sebagian besar wilayah	Rentan gangguan cuaca
Air Bersih	Mata air dan sumur	Mata air dan sumur	Terbatas saat musim kemarau
Telekomunikasi	Jaringan seluler & internet tersedia	Jaringan seluler & internet tersedia	Sinyal lemah di wilayah perbukitan

Tabel: menunjukkan kondisi umum infrastruktur utama yang mendukung aktivitas masyarakat dan logistik di Pulau Bawean.

Infrastruktur penyeberangan laut merupakan komponen paling vital dalam sistem transportasi dan logistik Pulau Bawean, mengingat pulau ini sepenuhnya bergantung pada jalur laut untuk berhubungan dengan daratan Pulau Jawa, khususnya Kabupaten Gresik. Penyeberangan Bawean–Gresik berfungsi sebagai jalur utama mobilitas penduduk, distribusi barang kebutuhan pokok, serta pengangkutan hasil produksi lokal seperti ikan dan hasil pertanian. Dua pelabuhan utama yang melayani aktivitas ini adalah **Pelabuhan Sangkapura**

dan **Pelabuhan Tambak**. Pelabuhan Sangkapura lebih dominan sebagai pelabuhan penumpang dan logistik utama, sedangkan Pelabuhan Tambak berfungsi sebagai alternatif penyeberangan dan distribusi barang, terutama untuk wilayah utara pulau. Keberadaan kedua pelabuhan ini sangat menentukan kelancaran arus logistik dan stabilitas ekonomi masyarakat Bawean.

Dalam mendukung aktivitas penyeberangan, Pulau Bawean dilayani oleh beberapa armada kapal penumpang dan kapal cepat yang menghubungkan Bawean dengan Pelabuhan Gresik. Armada ini melayani angkutan penumpang, barang, serta logistik kebutuhan harian masyarakat. Namun, frekuensi pelayaran masih terbatas dan sangat bergantung pada kondisi cuaca laut. Pada musim angin barat atau gelombang tinggi, jadwal penyeberangan sering mengalami penundaan bahkan pembatalan, yang berdampak langsung pada ketersediaan barang dan kenaikan harga kebutuhan pokok di Pulau Bawean. Selain itu, kapasitas angkut kapal yang terbatas menyebabkan distribusi barang dalam jumlah besar belum dapat dilakukan secara optimal, sehingga biaya logistik menjadi relatif tinggi dibandingkan wilayah daratan.

Dari sisi logistik, sebagian besar barang kebutuhan masyarakat Bawean seperti bahan pangan, bahan bakar, material bangunan, serta barang konsumsi lainnya didatangkan dari Gresik melalui kapal penyeberangan dan kapal barang. Sistem logistik ini masih bersifat konvensional dan bergantung pada jadwal kapal reguler. Meskipun demikian, keberadaan armada penyeberangan yang rutin telah menjadi tulang punggung keberlangsungan kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat Bawean. Ke depan, peningkatan kualitas pelabuhan, penambahan armada, serta peningkatan frekuensi dan kapasitas angkut kapal menjadi kebutuhan penting untuk memperkuat sistem logistik dan memperlancar konektivitas Pulau Bawean dengan pusat pertumbuhan ekonomi di Jawa.

Tabel Armada Penyeberangan Bawean–Gresik (Data Operasional Terbaru)

Nama Armada Kapal	Jenis Kapal	Rute Utama	Kapasitas Penumpang (±)	Fungsi Utama
KMP Gili Iyang	Kapal Ferry	Gresik – Bawean (PP)	300–350 orang	Penumpang & logistik
Express Bahari	Kapal Cepat	Gresik – Bawean (PP)	250–300 orang	Penumpang
Kapal Perintis	Kapal Penumpang	Antar pulau & Gresik	±200 orang	Transportasi reguler
Kapal Barang Lokal	Kapal Kargo	Gresik – Bawean	Variatif	Distribusi logistik

Tabel menunjukkan armada utama yang mendukung sistem penyeberangan dan logistik Pulau Bawean, baik untuk angkutan penumpang maupun distribusi barang

BAB III

PENGEMBANGAN PROGRAM KAPAL LOGISTIK KONSORSIUM KOPERASI DESA MERAH PUTIH BAWEAN (KDMP)

3.1 Pengantar KDMP dan Program Pengembangan Kapal logistik

Sebagai bagian dari strategi penguatan ekonomi kerakyatan, pemerintah pusat meluncurkan program Koperasi Desa Merah Putih, yang menjadi wadah ekonomi produktif berbasis komunitas desa. Koperasi ini menjunjung prinsip kekeluargaan, gotong royong, keadilan sosial, dan partisipasi kolektif. Kehadirannya diharapkan menjadi penggerak kesejahteraan masyarakat, memperkuat fondasi ekonomi desa, dan mendukung terbentuknya desa mandiri dan berdaya. Program ini juga dipandang relevan untuk menjawab tantangan globalisasi dan ketergantungan ekonomi masyarakat desa (Afgani & Wanusmawatie, 2025)

Komitmen pemerintah melalui Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2025 yang mendorong percepatan pembentukan Koperasi Desa Merah Putih sebagai pilar dalam kemandirian pangan dan pemberdayaan ekonomi lokal. Namun, dalam implementasinya di tingkat desa, masih banyak kendala yang dihadapi. Seperti rendahnya literasi koperasi, tata kelola yang lemah, serta keterbatasan pemahaman masyarakat mengenai koperasi. Menurut Saputri (2025), penguatan tata kelola dan kesadaran masyarakat merupakan aspek penting yang harus diprioritaskan agar koperasi benar-benar menjadi instrumen pembangunan desa. Meskipun demikian, implementasi Koperasi Desa Merah Putih di tingkat lokal tidak selalu berjalan sesuai harapan.

Di Bawean misalnya, koperasi dan struktur kepengurusannya telah telah terbentuk, tetapi hingga kini belum dapat beroperasi secara efektif. Salah satu penyebab utama adalah belum adanya keputusan terkait unit usaha yang akan dijalankan. Berbagai alternatif usaha dinilai sudah dilakukan seperti perdagangan, pertanian, pariwisata. Opsi yang tersisa, yaitu simpan pinjam, ditolak oleh perangkat desa karena dinilai berisiko tinggi terhadap kredit macet yang dapat membebani pengurus koperasi. Kondisi ini diperparah dengan rendahnya tingkat pemahaman dan partisipasi masyarakat terhadap koperasi. Akibatnya, sosialisasi yang dilakukan pemerintah desa maupun pihak eksternal belum sepenuhnya

mampu mendorong keterlibatan aktif masyarakat. Hal ini menimbulkan dilema: koperasi harus ada untuk memenuhi kewajiban administratif, tetapi tanpa partisipasi dan dukungan masyarakat, koperasi akan sulit berkembang menjadi instrumen pemberdayaan ekonomi.

Pulau Bawean merupakan wilayah kepulauan strategis di Laut Jawa yang secara administratif berada di Kabupaten Gresik, namun masih menghadapi keterbatasan konektivitas logistik laut. Ketergantungan tinggi terhadap jalur penyeberangan konvensional menjadikan distribusi barang, bahan pokok, dan kebutuhan pembangunan belum berjalan optimal, terutama saat kondisi cuaca buruk. Dalam konteks tersebut, Program Pengembangan Kapal Logistik Bawean yang digagas oleh Konsorsium Merah Putih hadir sebagai upaya terintegrasi untuk memperkuat sistem transportasi laut yang andal, aman, dan berkelanjutan. Program ini dirancang tidak hanya sebagai solusi teknis transportasi, tetapi juga sebagai instrumen penguatan ketahanan wilayah kepulauan dan pemerataan pembangunan antara wilayah daratan Jawa dan pulau terluar.

Konsorsium Merah Putih sebagai wadah kolaborasi antara pemerintah daerah, BUMN maritim, perguruan tinggi, pelaku industri perkapalan, serta masyarakat lokal, mengusung pendekatan pembangunan berbasis kebutuhan wilayah. Pengembangan kapal logistik diarahkan pada desain kapal yang sesuai dengan karakteristik perairan Bawean, kapasitas muatan yang fleksibel, serta efisiensi operasional yang mampu menekan biaya logistik. Selain itu, program ini juga mengintegrasikan aspek penguatan sumber daya manusia lokal melalui pelatihan awak kapal, manajemen pelabuhan, dan sistem distribusi logistik. Dengan demikian, keberadaan kapal logistik tidak hanya berfungsi sebagai sarana angkut, tetapi juga sebagai penggerak ekonomi maritim dan pencipta lapangan kerja baru bagi masyarakat Bawean. Lebih jauh, program pengembangan kapal logistik ini sejalan dengan visi kemandirian maritim nasional dan semangat “Merah Putih” dalam membangun kedaulatan wilayah kepulauan. Keberlanjutan program menjadi fokus utama melalui pemanfaatan teknologi ramah lingkungan, tata kelola operasional yang transparan, serta skema pembiayaan kolaboratif yang berorientasi jangka panjang. Diharapkan, dengan hadirnya armada kapal logistik yang terencana dan terkelola dengan baik, distribusi barang ke Pulau Bawean dapat berlangsung lebih cepat, stabil, dan terjangkau. Pada akhirnya, program ini

diharapkan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat, memperkuat konektivitas antarwilayah, serta menjadikan Bawean sebagai simpul logistik maritim yang tangguh di kawasan Laut Jawa.

3.2 Urgensitas Program Pengembangan Kapal logistik

Pulau Bawean sebagai wilayah kepulauan yang memiliki karakteristik geografis yang menuntut sistem logistik laut yang andal dan berkelanjutan. Keterpisahan wilayah dari daratan utama Jawa menyebabkan distribusi barang, bahan kebutuhan pokok, material pembangunan, serta logistik strategis lainnya sangat bergantung pada transportasi laut. Kondisi eksisting menunjukkan bahwa ketersediaan armada logistik masih terbatas, belum terjadwal secara konsisten, dan sangat dipengaruhi oleh kondisi cuaca. Dampaknya adalah tingginya biaya logistik, fluktuasi harga barang, serta kerentanan pasokan yang secara langsung memengaruhi stabilitas ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Dalam konteks perencanaan pembangunan daerah, kondisi tersebut menjadi isu strategis yang memerlukan intervensi kebijakan terarah melalui Program Pengembangan Kapal Logistik Konsorsium Merah Putih sebagai solusi struktural jangka menengah dan panjang.

Urgensitas program ini semakin menguat apabila dikaitkan dengan aspek pelayanan publik dan ketahanan wilayah. Distribusi logistik untuk sektor pendidikan, kesehatan, energi, dan pangan di Bawean masih menghadapi risiko keterlambatan dan ketidakpastian pasokan, terutama pada periode cuaca ekstrem. Keterbatasan sistem logistik berdampak pada efektivitas pelayanan dasar serta meningkatkan potensi kerentanan sosial dan ekonomi masyarakat. Melalui pendekatan konsorsium yang melibatkan pemerintah daerah, BUMN, pelaku usaha maritim, serta perguruan tinggi, Program Pengembangan Kapal Logistik dirancang untuk menghadirkan armada yang sesuai dengan karakteristik perairan Bawean, memiliki kapasitas muat yang memadai, serta beroperasi secara reguler. Program ini diharapkan mampu meningkatkan keandalan distribusi logistik, menekan disparitas harga, serta mendukung tercapainya standar pelayanan minimal di wilayah kepulauan.

Lebih lanjut, dari perspektif perencanaan pembangunan daerah, Program Pengembangan Kapal Logistik Konsorsium Merah Putih memiliki nilai strategis

dalam mendorong pertumbuhan ekonomi lokal dan integrasi wilayah. Bawean memiliki potensi sektor perikanan, kelautan, pariwisata, dan UMKM yang belum terhubung secara optimal dengan pasar regional akibat keterbatasan rantai pasok. Keberadaan kapal logistik yang terencana akan membuka akses distribusi dua arah, yaitu pemasokan kebutuhan dari daratan dan pengangkutan hasil produksi lokal ke pusat-pusat ekonomi. Dengan dukungan indikator kebutuhan yang terukur, program ini dapat diintegrasikan ke dalam dokumen perencanaan daerah, seperti RPJMD dan RKPD, sebagai upaya penguatan konektivitas wilayah, peningkatan daya saing ekonomi, serta perwujudan pembangunan kepulauan yang inklusif dan berkelanjutan.

Tabel Indikator Kebutuhan Program Pengembangan Kapal Logistik Bawean

No	Indikator Kebutuhan	Kondisi Eksisting	Dampak terhadap Pembangunan	Arah Kebutuhan Program
1	Ketersediaan Armada Logistik	Terbatas dan tidak reguler	Distribusi barang tidak stabil	Penyediaan kapal logistik khusus
2	Jadwal Pelayaran	Tidak pasti	Ketidakpastian pasokan	Penetapan jadwal tetap
3	Biaya Logistik	Relatif tinggi	Harga barang mahal	Efisiensi biaya distribusi
4	Ketahanan Pangan	Rentan cuaca ekstrem	Risiko kelangkaan	Armada tahan cuaca
5	Distribusi BBM & Energi	Bergantung daratan	Gangguan aktivitas ekonomi	Sistem logistik energi
6	Pelayanan Publik	Terhambat logistik	Pelayanan kurang optimal	Dukungan logistik sektor dasar
7	Distribusi Produk Lokal	Belum terintegrasi	Daya saing rendah	Jalur distribusi dua arah
8	SDM Maritim Lokal	Terbatas kompetensi	Ketergantungan eksternal	Program pelatihan dan pemberdayaan

3.3 Tujuan, saran dan Ruang Lingkup Program

Program Pengembangan Kapal Logistik Konsorsium Merah Putih dirancang sebagai instrumen strategis untuk meningkatkan konektivitas wilayah kepulauan, khususnya Pulau Bawean, melalui penguatan sistem transportasi dan distribusi logistik laut yang andal, efisien, dan berkelanjutan. Tujuan utama program ini

adalah menjamin ketersediaan dan kelancaran arus barang kebutuhan pokok, logistik strategis, serta hasil produksi lokal secara berkesinambungan, sehingga mampu menekan disparitas harga, meningkatkan stabilitas ekonomi, dan memperkuat ketahanan wilayah. Selain itu, program ini bertujuan mendukung efektivitas pelayanan publik di sektor pendidikan, kesehatan, energi, dan pangan melalui sistem logistik yang terencana dan terintegrasi. Dalam perspektif pembangunan daerah, program ini diharapkan menjadi pengungkit percepatan pembangunan kepulauan serta memperkuat peran Bawean sebagai bagian integral dari sistem logistik regional Jawa Timur.

Sasaran Program Pengembangan Kapal Logistik Konsorsium Merah Putih mencakup berbagai pemangku kepentingan dan sektor pembangunan. Sasaran langsung program ini adalah masyarakat Pulau Bawean sebagai penerima manfaat utama melalui peningkatan akses terhadap barang dan layanan dasar dengan harga yang lebih terjangkau dan pasokan yang lebih stabil. Sasaran lainnya meliputi pelaku usaha lokal, nelayan, dan UMKM yang memperoleh kemudahan distribusi hasil produksi ke pasar yang lebih luas. Dari sisi kelembagaan, sasaran program mencakup peningkatan kapasitas pemerintah daerah dan pengelola transportasi laut dalam perencanaan, pengelolaan, dan pengawasan sistem logistik kepulauan. Sementara itu, sasaran strategis jangka menengah adalah terciptanya sistem logistik dua arah yang mampu mengintegrasikan Bawean dengan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi regional, sekaligus mendorong kemandirian ekonomi berbasis potensi maritim lokal.

Ruang lingkup Program Pengembangan Kapal Logistik Konsorsium Merah Putih meliputi aspek perencanaan, pengadaan, operasional, dan penguatan ekosistem pendukung logistik laut. Pada tahap perencanaan, ruang lingkup program mencakup penyusunan kajian kebutuhan armada, desain kapal yang sesuai karakteristik perairan Bawean, serta penetapan rute dan jadwal pelayaran reguler. Tahap pengadaan meliputi pembangunan atau penyediaan kapal logistik, sarana pendukung bongkar muat, serta integrasi dengan fasilitas pelabuhan. Pada tahap operasional, program mencakup pengelolaan armada, sistem distribusi barang, serta mekanisme pengendalian biaya dan kualitas layanan. Selain itu, ruang lingkup program juga mencakup pengembangan sumber daya manusia maritim lokal, penerapan prinsip keselamatan dan ramah

lingkungan, serta penguatan koordinasi antaranggota konsorsium dan pemerintah daerah agar program berjalan efektif, akuntabel, dan berkelanjutan.

Tabel Tujuan, Sasaran, dan Ruang Lingkup Program

Aspek	Uraian
Tujuan Program	Menjamin kelancaran distribusi logistik, menekan disparitas harga, meningkatkan pelayanan publik, dan memperkuat konektivitas wilayah kepulauan
Sasaran Utama	Masyarakat Pulau Bawean sebagai penerima manfaat langsung
Sasaran Sektoral	Pelaku usaha lokal, nelayan, UMKM, sektor pendidikan, kesehatan, dan energi
Sasaran Kelembagaan	Pemerintah daerah dan pengelola transportasi laut
Ruang Lingkup Perencanaan	Kajian kebutuhan armada, desain kapal, rute dan jadwal pelayaran
Ruang Lingkup Pengadaan	Penyediaan kapal logistik dan sarana pendukung pelabuhan
Ruang Lingkup Operasional	Pengelolaan armada, distribusi barang, pengendalian biaya dan layanan
Ruang Lingkup Pendukung	Pengembangan SDM, keselamatan pelayaran, dan keberlanjutan lingkungan

3.4 Skema Pelaksanaan dan Kelembagaan Program

Pelaksanaan Program Pengembangan Kapal Logistik Konsorsium Merah Putih di Pulau Bawean memerlukan skema implementasi dan kelembagaan yang adaptif, kolaboratif, serta selaras dengan kerangka perencanaan pembangunan daerah. Mengingat kompleksitas wilayah kepulauan dan keterlibatan multi-pihak, alternatif skema pelaksanaan dirancang untuk memastikan efektivitas operasional, akuntabilitas pengelolaan, serta keberlanjutan program dalam jangka panjang. Secara umum, terdapat tiga pendekatan utama dalam skema pelaksanaan, yaitu skema berbasis pemerintah daerah, skema kemitraan pemerintah dan badan usaha, serta skema konsorsium multipihak yang menjadi ciri utama Program Konsorsium Merah Putih.

Alternatif pertama adalah skema pelaksanaan berbasis pemerintah daerah, di mana pemerintah daerah berperan sebagai penanggung jawab utama program

melalui perangkat daerah terkait, seperti Bappeda, Dinas Perhubungan, dan Dinas Perikanan dan Kelautan. Dalam skema ini, perencanaan, penganggaran, dan pengawasan program sepenuhnya berada dalam kewenangan pemerintah daerah, sementara operasional kapal dapat dikelola oleh UPTD atau BUMD yang dibentuk khusus. Skema ini memiliki keunggulan dari sisi kendali kebijakan dan kesesuaian dengan prioritas pembangunan daerah, namun memiliki keterbatasan dalam fleksibilitas pembiayaan dan efisiensi operasional apabila tidak didukung kapasitas kelembagaan yang memadai.

Alternatif kedua adalah skema kemitraan pemerintah dan badan usaha (KPBU), yang menempatkan pemerintah daerah sebagai regulator dan fasilitator, sementara badan usaha berperan dalam penyediaan armada, operasional, dan manajemen logistik. Skema ini memungkinkan optimalisasi pembiayaan non-APBD, peningkatan efisiensi operasional, serta transfer pengetahuan dan teknologi. Dalam konteks Bawean, KPBU dapat diterapkan secara terbatas dengan tetap mempertimbangkan aspek pelayanan publik dan keterjangkauan biaya bagi masyarakat. Pemerintah daerah tetap memiliki peran strategis dalam penetapan standar layanan, tarif, dan pengawasan agar tujuan sosial program tetap tercapai.

Alternatif ketiga sekaligus skema utama yang direkomendasikan adalah skema konsorsium multipihak melalui Konsorsium Merah Putih. Skema ini mengintegrasikan peran pemerintah daerah, BUMN/BUMD maritim, pelaku usaha perkapalan, perguruan tinggi, serta perwakilan masyarakat lokal dalam satu wadah kelembagaan kolaboratif. Pemerintah daerah berperan sebagai pengarah kebijakan dan penjamin kesesuaian program dengan dokumen perencanaan daerah, sementara konsorsium bertanggung jawab atas perencanaan teknis, pengadaan armada, dan operasional kapal logistik. Perguruan tinggi berperan dalam kajian teknis dan evaluasi kinerja, sedangkan masyarakat lokal dilibatkan dalam operasional dan pengawasan sosial.

Skema pelaksanaan Program Pengembangan Kapal Logistik Konsorsium Merah Putih di Bawean dirancang sebagai upaya terpadu untuk mengatasi keterbatasan konektivitas, tingginya biaya logistik, serta ketergantungan masyarakat Bawean terhadap pasokan dari Pulau Jawa, khususnya Gresik dan Surabaya.

Pelaksanaan program ini dilakukan melalui pendekatan konsorsium yang mengintegrasikan peran pemerintah daerah, BUMD, koperasi lokal, pelaku usaha logistik, serta komunitas masyarakat pesisir. Tahap awal dimulai dengan studi kebutuhan logistik wilayah Bawean yang mencakup jenis muatan prioritas (bahan pangan, BBM, bahan bangunan, hasil perikanan, dan kebutuhan UMKM), analisis rute pelayaran, serta kapasitas kapal yang sesuai dengan kondisi pelabuhan Bawean. Selanjutnya, dilakukan pengadaan atau konversi kapal logistik berukuran menengah yang mampu beroperasi secara reguler dengan jadwal tetap, sehingga menciptakan kepastian distribusi barang. Skema operasional kapal dirancang berbasis *multi-purpose logistics*, yaitu kapal tidak hanya mengangkut barang masuk ke Bawean, tetapi juga membawa muatan balik berupa hasil laut, produk pertanian, dan kerajinan lokal untuk meningkatkan efisiensi biaya. Sistem tarif diberlakukan secara transparan dan terstandar melalui kesepakatan konsorsium, dengan dukungan subsidi terbatas atau *viability gap funding* pada tahap awal untuk menjaga keterjangkauan harga barang bagi masyarakat. Digitalisasi logistik melalui pencatatan muatan, jadwal pelayaran, dan pemesanan ruang kargo juga menjadi bagian penting dari skema pelaksanaan guna meningkatkan akuntabilitas dan efisiensi layanan.

Kelembagaan dan Tata Kelola Program.

Dari sisi kelembagaan, Program Pengembangan Kapal Logistik Konsorsium Merah Putih di Bawean dikelola melalui pembentukan badan pengelola bersama yang bersifat semi-bisnis dan berorientasi pelayanan publik. Kelembagaan ini dapat berbentuk Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) bersama atau koperasi konsorsium yang melibatkan pemerintah kabupaten, perwakilan kecamatan di Bawean, koperasi nelayan, dan pelaku usaha lokal. Pemerintah daerah berperan sebagai regulator, fasilitator, serta penyedia dukungan kebijakan, termasuk perizinan, penyediaan dermaga, dan insentif fiskal. Sementara itu, unsur koperasi dan pelaku usaha bertanggung jawab pada operasional harian, pengelolaan muatan, serta pemeliharaan kapal. Model kelembagaan ini mendorong rasa kepemilikan bersama (*collective ownership*) sehingga keberlanjutan program tidak sepenuhnya bergantung pada APBD. Selain itu, mekanisme pengawasan dilakukan melalui dewan pengarah yang melibatkan unsur pemerintah, tokoh masyarakat Bawean, dan akademisi untuk memastikan

program berjalan sesuai prinsip transparansi, efisiensi, dan keadilan distribusi. Kelembagaan konsorsium juga membuka peluang kemitraan dengan BUMN pelayaran, lembaga perbankan syariah, serta program CSR untuk memperkuat permodalan dan transfer teknologi. Dengan struktur kelembagaan yang kolaboratif dan adaptif, program ini diharapkan mampu menjadi tulang punggung sistem logistik Bawean, memperkuat ekonomi lokal, menekan disparitas harga, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat kepulauan secara berkelanjutan.

Tabel Alternatif
Skema Pelaksanaan Program Kapal Logistik Konsorsium Merah Putih di Bawean

No	Alternatif Skema	Pelaksana Utama	Sumber Pendanaan	Kelebihan	Tantangan
1	BUMD Logistik Bawean	Pemkab & BUMD	APBD + Penyertaan Modal Daerah	Kendali pemerintah kuat, tarif lebih stabil	Beban fiskal tinggi di awal
2	Koperasi Konsorsium Merah Putih	Koperasi nelayan & UMKM	Iuran anggota + Kredit perbankan	Partisipasi masyarakat tinggi	Manajemen perlu penguatan
3	Kemitraan Publik–Swasta (PPP)	Pemda & Swasta	Swasta + Insentif pemerintah	Efisiensi dan profesionalisme	Risiko dominasi swasta
4	Penugasan BUMN Pelayaran	BUMN & Pemda	APBN + Subsidi logistik	Armada dan SDM siap	Fleksibilitas lokal terbatas
5	Skema Hybrid Konsorsium	BUMD + Koperasi + Swasta	Campuran APBD, swasta, koperasi		

BAB IV
ANALISIS SOSIAL MASYARAKAT DALAM PENGEMBANGAN KAPAL LOGISTIK

Pada bagian ini kami menyajikan analisis sosial masyarakat Bawean terhadap rencana Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) dalam Pengembangan Kapal Logistik Konsorsium Merah Putih. Analisis disusun berdasarkan hasil diskusi kelompok terarah (FGD), aspirasi peserta, serta dinamika sosial yang muncul dalam notulensi pertemuan. Fokus utama bab ini adalah memahami persepsi dan respon masyarakatlangsung, potensi dampak sosial ekonomi, risiko konflik sosial, serta keberlanjutan sosial program sebagai dasar perumusan rekomendasi kebijakan daerah sementara.

1.1 Persepsi, Partisipasi, dan Respon Masyarakat

Persepsi masyarakat Bawean terhadap rencana pengembangan kapal logistik menunjukkan pola yang beragam, mulai dari harapan besar hingga sikap pesimis dan kehati-hatian. Secara umum, masyarakat tidak menolak gagasan kapal logistik, namun menilai bahwa konsep tersebut masih bersifat wacana dan belum disertai kejelasan teknis maupun kelembagaan. Banyak peserta FGD memahami forum ini sebagai ruang untuk "bermimpi" dan menyampaikan aspirasi sosial, bukan sebagai pengambilan keputusan final. Hal ini tercermin dari pertanyaan berulang mengenai bentuk kapal, kapasitas, sumber pendanaan, kepemilikan, serta pihak yang akan bertanggung jawab apabila terjadi risiko operasional.

Respon masyarakat memperlihatkan adanya kesenjangan antara kebutuhan riil masyarakat dengan terminologi program yang ditawarkan. Masyarakat Bawean secara konsisten menegaskan bahwa kebutuhan paling mendesak bukan semata kapal logistik, melainkan kapal penumpang atau kapal kombinasi logistik–penumpang yang mampu beroperasi pada kondisi gelombang tinggi, khususnya saat musim angin. Persepsi ini terbentuk dari pengalaman panjang masyarakat menghadapi keterisolasian wilayah, terhambatnya mobilitas orang, serta terganggunya aktivitas ekonomi akibat keterbatasan armada yang ada.

Partisipasi masyarakat dalam diskusi tergolong aktif, kritis, dan reflektif. Peserta tidak hanya menyampaikan harapan, tetapi juga kekhawatiran mendalam terhadap kemungkinan dampak sosial, ekonomi, dan kelembagaan. Namun demikian, muncul pula catatan penting terkait rendahnya partisipasi struktural koperasi, khususnya KDMP Merah Putih, yang merasa belum dilibatkan secara internal dalam perumusan ide konsorsium. Kondisi ini berpotensi menimbulkan resistensi apabila program dilanjutkan tanpa mekanisme partisipasi yang lebih inklusif dan deliberatif.

Tabel 1.
Ringkasan Analisis Sub bab 1.1
Persepsi, Partisipasi, dan Respon Masyarakat

Aspek Analisis	Temuan Utama	Implikasi Sosial
Persepsi masyarakat	Program dipahami masih sebagai wacana/kajian awal	Masyarakat menuntut kejelasan konsep dan tujuan program
Kebutuhan utama	Kapal penumpang atau kapal kombinasi logistik–penumpang	Desain kapal logistik murni berisiko tidak diterima
Respon masyarakat	Kritis, berhati-hati, sebagian pesimis	Diperlukan pendekatan persuasif dan dialogis
Partisipasi koperasi	Belum optimal, KDMP merasa belum dilibatkan	Potensi resistensi jika partisipasi tidak diperkuat

1.2 Dampak Sosial Ekonomi Pengembangan Kapal Logistik

Dari perspektif sosial ekonomi, pengembangan kapal logistik dipersepsikan memiliki potensi manfaat yang signifikan, terutama dalam menciptakan stabilitas harga dan ketersediaan barang kebutuhan pokok. Kata kunci "stabil" muncul berulang dalam diskusi, menggambarkan harapan masyarakat terhadap stabilisasi harga sembako, BBM, serta pengurangan praktik penimbunan dan spekulasi yang kerap terjadi saat distribusi terhambat. Kapal logistik dengan jadwal reguler diyakini dapat memperbaiki relasi sosial antara penjual dan pembeli, yang selama ini sering tegang akibat kelangkaan barang.

Namun demikian, masyarakat juga mengidentifikasi potensi dampak negatif, khususnya terkait risiko kelebihan pasokan pada pasar lokal yang relatif kecil. Kekhawatiran terhadap barang yang tidak laku dan berujung pada kedaluwarsa (expired) menjadi isu penting, terutama bagi pedagang kecil. Hal ini menunjukkan bahwa peningkatan suplai logistik harus diimbangi dengan perencanaan distribusi, pengendalian volume barang, serta integrasi dengan kebutuhan riil konsumsi masyarakat Bawean.

Dampak ekonomi juga dikaitkan dengan keberlanjutan usaha koperasi. Sebagian peserta menolak apabila pengadaan kapal sepenuhnya dibebankan pada modal koperasi desa tanpa jaminan kelayakan usaha, asuransi, dan perlindungan risiko. Kapal logistik dipandang bukan sekadar sarana ekonomi, tetapi aset strategis yang membawa implikasi jangka panjang terhadap kepercayaan anggota koperasi dan stabilitas ekonomi lokal.

Tabel 2.
Ringkasan Analisis Subbab 1.2
Dampak Sosial Ekonomi Pengembangan Kapal Logistik

Aspek Dampak	Dampak Positif Potensial	Dampak Negatif Potensial
Harga & distribusi	Stabilitas harga sembako dan BBM	Kelebihan pasokan pada pasar kecil
Relasi sosial	Mengurangi konflik penjual–pembeli	Risiko ketegangan jika distribusi tidak adil
Pedagang lokal	Akses barang lebih terjamin	Barang tidak laku dan risiko kedaluwarsa
Koperasi desa	Peluang penguatan ekonomi kolektif	Risiko keuangan jika tanpa asuransi & kelayakan

1.3 Potensi Konflik Sosial dan Strategi Mitigasi

Potensi konflik sosial menjadi salah satu isu sentral dalam diskusi masyarakat. Konflik diperkirakan dapat muncul pada beberapa level, antara lain konflik distribusi saat musim angin, konflik antar pelaku usaha logistik, konflik antara masyarakat dan pengelola kapal, serta konflik internal koperasi. Keterbatasan

akses transportasi pada periode tertentu berpotensi memicu perebutan muatan, tiket, maupun BBM, yang dapat memperkeruh hubungan sosial.

Selain itu, kekhawatiran terhadap munculnya mafia logistik dan praktik monopoli juga mengemuka. Pengalaman sebelumnya menunjukkan bahwa ketidakjelasan regulasi dan pengawasan sering kali membuka ruang bagi aktor tertentu untuk menguasai distribusi barang. Apabila kapal logistik dikelola tanpa tata kelola yang transparan, risiko konflik horizontal maupun vertikal akan semakin besar.

Strategi mitigasi konflik yang dapat dirumuskan antara lain meliputi penetapan aturan distribusi yang adil dan transparan, pelibatan perwakilan masyarakat dan tokoh lokal dalam pengawasan operasional, serta penyusunan mekanisme pengaduan publik. Selain itu, kejelasan status kepemilikan, asuransi kapal, dan pembagian tanggung jawab harus ditetapkan sejak awal untuk menghindari konflik pasca-operasional.

Tabel 3.
Ringkasan Analisis Subbab 1.3
Potensi Konflik Sosial dan Strategi Mitigasi

Sumber Potensi Konflik	Bentuk Konflik	Strategi Mitigasi
Musim angin	Perebutan muatan, tiket, BBM	Aturan distribusi & jadwal transparan
Tata kelola kapal	Tuduhan monopoli / mafia logistik	Pengawasan partisipatif & audit terbuka
Kelembagaan koperasi	Konflik internal anggota	Musyawarah dan persetujuan anggota
Risiko kecelakaan	Sengketa tanggung jawab	Asuransi kapal & kejelasan regulasi

1.4 Analisis Keberlanjutan Sosial Program

Keberlanjutan sosial program pengembangan kapal logistik sangat ditentukan oleh tingkat penerimaan masyarakat dan kesesuaian program dengan kebutuhan lokal. Program ini berpotensi berkelanjutan secara sosial apabila diposisikan sebagai layanan publik yang adaptif terhadap kondisi geografis dan sosial Bawean, bukan semata sebagai proyek bisnis atau simbol kebijakan. Kapal yang

tidak mampu beroperasi pada gelombang tinggi akan sulit diterima masyarakat dan berisiko menjadi simbol kegagalan program.

Keberlanjutan juga menuntut adanya rasa memiliki (sense of ownership) dari masyarakat. Konsep kepemilikan bersama melalui konsorsium hanya akan efektif apabila didahului dengan proses sosialisasi, musyawarah, dan persetujuan anggota koperasi secara demokratis. Tanpa hal tersebut, konsorsium justru berpotensi dipersepsikan sebagai beban sosial dan ekonomi.

Selain itu, keberlanjutan sosial mensyaratkan sensitivitas terhadap nilai budaya, agama, dan struktur sosial masyarakat Bawean. Kehadiran awak kapal dari luar daerah perlu dikelola secara bijak agar tidak menimbulkan gesekan budaya atau persepsi ancaman terhadap identitas lokal.

Tabel 4.

Ringkasan Analisis Subbab 1.4
Keberlanjutan Sosial Program

Dimensi Keberlanjutan	Kondisi yang Diharapkan	Risiko Jika Tidak Dipenuhi
Penerimaan sosial	Kapal sesuai kebutuhan lokal	Penolakan dan delegitimasi program
Rasa memiliki	Kepemilikan kolektif yang disepakati	Konsorsium dianggap beban sosial
Sensitivitas budaya	Pengelolaan awak & operasional adaptif	Gesekan budaya dan sosial
Kepercayaan publik	Transparansi dan akuntabilitas	Turunnya kepercayaan masyarakat

BAB V
PENUTUP
Rekomendasi Kebijakan Sementara

Berdasarkan analisis sosial yang telah diuraikan, beberapa rekomendasi kebijakan sementara dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Pemerintah daerah perlu menegaskan bahwa program kapal logistik masih berada pada tahap kajian, serta memastikan keterbukaan informasi terkait tujuan, skema, dan batasan program.
2. Desain kapal harus diarahkan pada kapal logistik–penumpang yang tahan terhadap gelombang minimal 3 meter, sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakat Bawean.
3. Keterlibatan koperasi, khususnya KDMP Merah Putih, harus dimulai dari proses perencanaan awal melalui musyawarah internal dan persetujuan anggota.
4. Skema pembiayaan wajib disertai dengan jaminan asuransi, analisis kelayakan usaha, serta pembagian risiko yang adil.
5. Diperlukan regulasi operasional yang jelas dan mekanisme pengawasan partisipatif untuk mencegah konflik sosial dan praktik monopoli.

Rekomendasi ini bersifat sementara dan menjadi dasar untuk penyusunan kebijakan lanjutan yang lebih komprehensif setelah kajian teknis, ekonomi, dan hukum diselesaikan secara menyeluruh.

LAMPIRAN FOTO KEGIATAN



Arahan oleh Bapak Camat



Sambutan Rektor





